

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2024

IKU Kepala OPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Depenisi Oprasional	Formulasi	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah Sektor Perdagangan, Sektor Industri pengolahan yang berdaya saing serta meningkatnya kemapanan ekonomi masyarakat	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Sektor Industri Pengolahan serta Pertumbuhan Kooperasi dan UMKM	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan	Perbandingan antara selisih nilai PDRB atas harga konstan katagori lapagan usaha industry	Perhitungan Persentase PDRB Sektor Industri Pengolahan berdasarkan harga berlaku oleh BPS	3,15%	3,15%	3,15%	3,50%	3,80%	BPS Kab.B/S Tahun 2021	Kepala Dinas Perdagangan Kab.B/S
			Meningkatnya Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Kecil	Pertumbuhan Fasilitas Perdagangan seperti Pasar dan lain lain	Perhitungan Persentase PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Kecil berdasarkan harga berlaku oleh BPS	16,33%	16,33%	16,66%	16,74 %	16,85%	BPS Kab.B/S Tahun 2021	Kepala Dinas Perdagangan Kab.B/S
			Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	Jumlah Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan (Pembentukan Koperasi dan atau Koperasi aktif kembali, koperasi yang dibina, diawasi dalam 1 tahun)/total	Persentase koperasi aktif secara lembaga, usaha selama 5 tahun berjumlah 86 koperasi <u>Koperasi yang diawasi (17) x 100%</u>	17,67%	17,67%	17,67%	17,67%	17,67%	Bidang Koperasi & UM	Kepala Dinas Perdagangan Kab.B/S

					target koperasi aktif secara lembaga dan usaha selama 5 tahun	19,76% Jumlah koperasi aktif (86)							
					Pertumbuhan UMKM yang dibina, difasilitasi dalam 1 tahun di bagi dengan target selama 5 tahun	Persentase UMKM aktif, sehat, produktif selama 5 tahun berjumlah 770 <u>UMKM produktif</u> x 100% Jumlah UMKM binaan 15,58%	17,67%	17,67%	17,67%	17,67%	17,67%	Bidang Koperasi & UM	Kepala Dinas Perdagangan Kab.B/S

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2024

IKU Eslon III

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Idikator Program dan Kegiatan	Depinisi Oprasional	Formulasi	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2022	2023	2024	2025	2026		
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Pembangunan Industri	Persentase Industri yang berkembang	Persentasi sebagian besar didorong oleh peningkatan industry konsumsi rumah tangah dan salah satu industry yang berkembang pesar adalah industry makanan dan minuman	<u>Produksi Industri yang berkembang</u> Pembangunan Industri $= \frac{5}{25} \times 100 = 20\%$	20%	20%	20%	20%	20%	Bidang Perindustrian	Kabid Industri
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota	Untuk mendapatkan pedoman dan kerangka acuan pembangunan industry yang direncanakan	Persentase target pembangunan evaluasi industri	Persentase dokumen izin usaha industry (IUI kecil kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industry bagi IKM untuk pemberataan pembangunan industry	<u>Kerangka acuan pembangunan industry</u> Target Pembangunan evaluasi industry $= \frac{1}{5} \times 100 = 20\%$	20%	20%	20%	20%	20%	Bidang Perindustrian	Kabid Industri
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri nasional	Untuk mempermudah pelaporan dan data-data yang berkenaan dengan industry kabupaten yang akurat baik	Persentase pemantauan seluruh industri IKM yang tersebar	Keakuratan semua kegiatan pengelolaan data harus diupayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, tepat, dan benar	<u>Seluruh industri IKM</u> Data-data pelaporan industry $= 75\%$	75%	75%	75%	75%	75%	Bidang Perindustrian	Kabid Industri

		industry kecil dan menengah										
	Penyediaan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten	Seluru IKM Kabupaten dapat mempermudah melaksanakan kegiatan industry yang dikelola dengan informasi	Persentase pemantauan IKM yang ada di Kabupaten	Persentase pemantauan IKM yang mempunyai izin usaha	<u>Kegiatan industry yang dikelola dengan informasi</u> x 100% Seluruh IKM $= \frac{80}{487} \times 100 = 16,4\%$	16,4 %	16,4 %	16,4 %	16,4 %	16,4 %	Bidang Perindustrian	Kabid Industri
3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Agar seluruh IKM, yang ada memiliki izin usaha yang ditetapkan oleh pemerintah yang terdaftar	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri (IUI)industry kecil menengah	Meningkatkan perhatian IKM terhadap ligalitas usaha melalui perizinan berusaha yang dapat di akses mudah melalui online	<u>IKM memiliki Izin</u> x 100% Seluruh data IKM $= \frac{87}{487} \times 100 = 17,8\%$	17,8 %	17,8 %	17,8 %	17,8 %	17,8 %	Bidang Perindustrian	Kabid Industri
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha-usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/ko	Agar seluruh IKM memiliki kegiatan yang jelas (izin usaha)	Persentase IKM dapat memperluas usaha yang dikelola	Peningakatan izin usaha dapat memperluas usaha IKM yang dikelola	<u>IKM yang memiliki Izin</u> x 100% Seluruh IKM $= \frac{87}{487} \times 100 = 17,8\%$	17,8 %	17,8 %	17,8 %	17,8 %	17,8 %	Bidang Perindustrian	Kabid Industri

	ta berbasis sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)										
4	Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Meningkatnya pemenuhan kometmen perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi kometmen perizinan dan pendaftaran perusahaan	Jumlah rekomendasi yang di keluarkan untuk perizinan pelaku usaha	$\% = \frac{\text{Jml Badan Usaha yang memenuhi Komitmen}}{\text{Jumlah Seluruh Badan Usaha di B/S}} \times 100\%$	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	Bidang Perdagangan
	Kegiatan penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat pembelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Meningkatnya Fasilitasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat pembelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat pembelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan izin took swalayan	$\% = \frac{\text{Jumlah PR, PP, TS yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Seluruh PR, PP, TS di B/S}} \times 100\%$	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	Bidang Perdagangan
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Meningkatnya Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Pelaku Usaha/Badan Usaha	Persentase Fasilitasi Badan Usaha untuk memiliki Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi badan usaha dalam peneribatan tanda Daftar Gudang	$\% = \frac{\text{Jml Badan Usaha Gudang yang di Fasilitasi}}{\text{Jumlah Seluruh Gudang di B/S}} \times 100\%$	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	Bidang Perdagangan
	Kegiatan	Meningkatnya	Persentase	Jumlah	$\% = \frac{\text{Jml Badan Usaha di Fasilitasi STPW}}{\text{Jumlah Seluruh Badan Usaha di B/S}} \times 100\%$	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	Bidang Perdagangan

	penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima Waralaba dari waralaba dalam negeri	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Pelaku Usaha/Badan Usaha	Pelaku Usaha yang difasilitasi untuk memiliki Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Rekomendasi STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba)	Jumlah Seluruh Badan Usaha Waralaba di B/S					%		
	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya di Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Pengawasan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya	<u>Jml Gudang Penyimpanan bahan berbahaya di amati bagi x 100</u> Jumlah Seluruh Gudang Penyimpanan bahan berbahaya di B/S	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	Bidang Perdagangan	Kabid Perdagangan

	Kegiatan penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Percentase Badan Usaha yang difasilitasi untuk mendapat Penerbitan SKA	Jumlah Rekomendasi SKA (Surat Ketarangan Asal)	<u>Jml Badan Usaha yang di Fasilitasi x 100 %</u> Jumlah Seluruh Badan Usaha B/S	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	Bidang Perdagangan	Kabid Perdagangan
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	Percentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan ditata	Jumlah Fasilitas Perdagangan yang di bangun	<u>Jml Sarana Perdagangan yang dibangun / ditata x 100 %</u> Jumlah Seluruh Sarana Perdagangan B/S	80%	80%	80%	80%	100%	Bidang Perdagangan	Kabid Perdagangan
	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	meningkatnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Percentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	Jumlah Fasilitas Perdagangan yang di kelola	<u>Jml Sarana dibangun / kelola x 100 %</u> Jumlah Seluruh Sarana B/S	80%	80%	80%	80%	100%	Bidang Perdagangan	Kabid Perdagangan
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelolaan sarana Distribusi	Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan di Wilayah	Percentase Pembinaan dan Pengendalian, Pemberdaya	Jumlah Pengelolaan Sarana Perdagangan	<u>Jml Pengelola yang di bina x 100 %</u> Jumlah Seluruh Pengelola B/S	80%	80%	80%	80%	100%	Bidang Perdagangan	Kabid Perdagangan

	Perdagangan Masyarakat di Wilaya Kerjanya	Kerjanya	an Pengelolaan sarana distribusi Perdagangan									
6	Program Satbilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang penting	Terjaganya Satbilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang penting	Percentase Koefisiensi variasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang penting	Jumlah Pemantau Hrga kebutuhan Pokok dan Barang Penting	$KV = \frac{S}{X} \times 100\%$ X KV = Koefisien Variasi S = Simpanan Standar X = Rata – Rata	80%	80%	80%	80%	100%	Bidang Perdagangan	Kabid Perdagangan
	Kegiatan Menjamin ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah	Tersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah	Percentase ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah	Jumlah Pemnataun Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	$\% = \frac{\text{Kebutuhan Barang Pokok}}{\text{Barang Pokok dan barang penting yang tersedia}} \times 100\%$ B/S	80%	80%	80%	80%	100%	Bidang Perdagangan	Kabid Perdagangan
	Kegiatan Pengedalian harga, dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan barang penting di	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Percentase Pelaksanaan Kegiatan pengendalian Harga dan stok Barang penting di tingkat Pasar	Jumlah Pemantau distribusi Barang di tingkat Agen / pengencer	$\% = \frac{\text{Jml Agen / Pengecer yang di kunjungi}}{\text{Jumlah Seluruh Agen / Pengecer di B/S}} \times 100\%$	80%	80%	80%	80%	100%	Bidang Perdagangan	Kabid Perdagangan

	Tingkat Pasar kabupaten/kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota									
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah	Jumlah Kios yang di pantau dalam distribusi Pupuk Subsidi	$\% = \frac{\text{Jml Kios yang Di Monitoring}}{\text{Jumlah Seluruh Kios B/S}} \times 100\%$	80%	80%	80%	80%	100%	Bidang Perdagangan	Kabid Perdagangan
7	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Terjaminnya kepastian Hukum dan kebenaran dalam Penggunaan alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) serta satuan ukuran dalam perdagangan dan kesehatan	Persentase alat UTPP bertanda tera tahun berlaku	Jumlah alat UTPP yang sudah bertanda tera tahun berlaku oleh kemetrologian	$\% = \frac{\text{alat UTPP bertanda tera tahun berlaku}}{\text{Potensi alat UTPP}} \times 100\%$	8%	10%	11,3 %	13,3 %	16,6 %	Laporan Tahunan Kmeterologian	UPTD Metrologi Kab. Bengkulu Selatan
	Kegiatan Pelaksanaan metrology Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan	Terjaminnya kepastian Hukum dan kebenaran dalam Penggunaan alat Ukur, Takar, Timbangan dan	Persentase alat UTPP bertanda tera tahun berlaku	Jumlah alat UTPP yang sudah bertanda tera tahun berlaku oleh kemetrologian	$\% = \frac{\text{alat UTPP bertanda tera tahun berlaku}}{\text{Potensi alat UTPP}} \times 100\%$	8%	10%	11,3 %	13,3 %	16,6 %	Laporan Tahunan Kmeterologian	UPTD Metrologi Kab. Bengkulu Selatan

		Perlengkapan (UTTP) serta satuan ukuran dalam perdagangan dan kesehatan										
8	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri	Percentase Penggunaan dan pemasaran Produk dalam negeri	Jumlah UMKM dalam Penggunaan dan Pemasaran produk Dalam Negeri	<u>Jumlah UMKM dalam Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri</u> x 100% Jumlah Seluruh UMKM	-	80%	80%	80%	80%	Bidang Perdagangan	Kabid Perdagangan
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan pennggunaan produk dalam negeri	Percentase Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan pennggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM dalam Pelaksanaan promosi, pemasaran dan penggunaan dalam negeri	<u>Jumlah UMKM dalam Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri</u> x 100% Seluruh Jumlah UMKM	-	80%	80%	80%	80%	Bidang Perdagangan	Kabid Perdagangan
9	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	meningkatnya Koperasi yang sehat dan aktif	Percentase Koperasi yang sehat dan aktif serta akuntabel	Jumlah koperasi yang diawasi secara kelembagaan dan Usaha dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah koperasi aktif	<u>Jumlah peningkatan koperasi sehat, aktif</u> Jumlah koperasi (86 Jumlah Koperasi, 12,15,17,20,22 Jumlah Koperasi sehat dan aktif dalam 5 Tahun)	13,9 %	17,4 %	19,7 %	23,2 %	25,5 %	Bidang Koperasi	Kabid Koperasi
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi	meningkatnya Koperasi yang sehat dan aktif serta patuh terhadap	Jumlah Koperasi yang sehat dan aktif serta patuh	Jumlah koperasi yang diawasi secara kelembagaan dan Usaha dalam 1 tahun dibagi	<u>Jumlah peningkatan koperasi sehat, aktif</u> Jumlah koperasi (86 Jumlah Koperasi, 12,15,17,20,22 Jumlah Koperasi sehat dan aktif dalam 5 Tahun)	13,9 %	17,4 %	19,7 %	23,2 %	25,5 %	Bidang Koperasi	Kabid Koperasi

	Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	peraturan perundang-undangan	terhadap peraturan perundang-undangan	dengan jumlah koperasi aktif							
10	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Kesehatan KSP/USP	Percentase KSP/USP sehat	Jumlah Koperasi simpan Pinjam /USP yang diawasi dalam 1 tahun dibagi dengan Jumlah KSP, USP yang Ada	<u>KSP/USP sehat</u> Jumlah KSP/USP	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	Bidang Koperasi
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko	meningkatnya Kesehatan KSP/USP secara kelembagaan dan usaha	Percentase KSP/USP koperasi yang sehat dan akuntabel secara kelembagaan dan usaha	Jumlah Koperasi simpan Pinjam /USP yang diawasi dalam 1 tahun dibagi dengan Jumlah KSP, USP yang Ada	<u>KSP/USP sehat</u> Jumlah KSP/USP	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	Kabid Koperasi

	ta											
11	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Meningkatnya koperasi yang memiliki SDM yang handal dan berdaya saing	Percentase koperasi yang memiliki SDM yang handal	Jumlah Pengurus/ anggota koperasi yang dilatih,dibina dibagi dengan jumlah total pengurus,anggota koperasi yang ada	<u>SDM koperasi handal</u> Jumlah pengurus Koperasi (86 Jumlah Koperasi, 17,17,17,17,18 Jumlah SDM Koperasi Handal dalam 5 Tahun)	19,7 %	19,7 %	19,7 %	19,7 %	20,9 %	Bidang Koperasi	Kabid Koperasi
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya koperasi yang memiliki SDM yang handal dan berdaya saing	Percentase koperasi yang memiliki SDM yang handal	Jumlah Pengurus/ anggota koperasi yang dilatih,dibina dibagi dengan jumlah total pengurus,anggota koperasi yang ada	<u>SDM koperasi handal</u> Jumlah pengurus Koperasi (86 Jumlah Koperasi, 17,17,17,17,18 Jumlah SDM Koperasi Handal dalam 5 Tahun)	19,7 %	19,7 %	19,7 %	19,7 %	20,9 %	Bidang Koperasi	Kabid Koperasi
12	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi	Percentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi baik perizinan, kemitraan dan usaha dibagi dengan total koperasi yang ada	<u>Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi</u> Jumlah koperasi (86 Jumlah Koperasi, 17,17,17,17,18 Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi dalam 5 Tahun)	19,7 %	19,7 %	19,7 %	19,7 %	20,9 %	Bidang Koperasi	Kabid Koperasi
	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi dalam daerah kabupaten/kota	Percentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi keanggotaannya	Jumlah Koperasi yang difasilitasi baik perizinan, kemitraan dan usaha dibagi dengan total koperasi yang ada	<u>Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi</u> Jumlah koperasi (86 Jumlah Koperasi, 17,17,17,17,18 Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi keanggotaannya dalam 5 Tahun)	19,7 %	19,7 %	19,7 %	19,7 %	20,9 %	Bidang Koperasi	Kabid Koperasi

	ta											
13	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya UMKM yang akuntabel dan berdaya saing	Persentase UMKM yang Akuntabel dan berdaya saing	<u>Jumlah UMKM</u> yang dibina dan difasilitasi (NIB,PIRT, akuntasi Pembukuan dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah target UMKM selama 5 tahun)	<u>Peningkatan UMKM</u> Jumlah UMKM (770 Jumlah UMKM, 120,150,170,200,230 Jumlah UMKM yang akuntabel dan berdaya saing selama 5 Tahun)	15,5 %	19,4 %	22%	25,9 %	29,8 %	Bidang Koperasi dan UM	Kabid Koperasi
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui Pendataan, kemitraaan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku kepentingan bagi UMKM	Meningkatnya Pendataan, kemitraaan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku kepentingan bagi UMKM	Persentase Usaha Mikro yang di data, kemitraaan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku kepentingan	<u>Jumlah UMKM</u> yang dibina dan difasilitasi (NIB,PIRT, akuntasi Pembukuan dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah target UMKM selama 5 tahun)	<u>Peningkatan UMKM</u> Jumlah UMKM (770 Jumlah UMKM, 120,150,170,200,230 Jumlah UMKM yang di data, kemitraan kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku kepentingan selama 5 Tahun)	15,5 %	19,4 %	22%	25,9 %	29,8 %	Bidang Koperasi	Kabid Koperasi
14	Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya Kinerja OPD	Tercapainya tujuan OPD (persentase PDRB sektor perdagangan, industri pengolahan	Perbandingan antara selisih nilai PDRB atas harga konstan katagori lapagan usaha industry dan Pertumbuhan Fasilitas	Program seluruh kepala bidang	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Sekretaris

		serta meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UMKM)	Perdagangan seperti Pasar dan lain lain serta Pertumbuhan (Pembentukan Koperasi dan atau Koperasi aktif kembali, koperasi yang dibina, diawasi dalam 1 tahun)/total target koperasi aktif secara lembaga dan usaha selama 5 tahun dan Pertumbuhan UMKM yang dibina, difasilitasi dalam 1 tahun dibagi dengan target selama 5 tahun								
		Nilai AKIP OPD	Nilai hasil Evaluasi Akip	Hasil Evaluasi Sakip dari Inspektorat	75 Nilai BB	80 Nilai A	85 Nilai AA	90 Nilai AA	95 Nilai AA	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Sekretaris
		Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Akuntabel (Minim LHP)	Pemeriksaan Pegelola keuangan dan BMD minin LHP	Hasil Pemeriksaan dari Ispektorat dan BPK	Tidak ada temuan	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Sekretaris				
		Indek reformasi Birokrasi Baik	Nilai Indek RB baik	Hasil penilaian reformasi birokrasi Kemenpan RB	Baik	Baik	Baik	Baik	baik	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Sekretaris
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya Kinerja ASN	Persentase capaian kinerja seluruh	Sarana dan prasarana kebutuhan	<u>Capaian Kinerja x 100</u> Target Kinerja	80%	85%	90%	95%	100%	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Sekretaris

			ASN	pegawai untuk menunjang capaian kinerja seluruh ASN									
Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Optimalnya Kinerja ASN	Persentase capaian kinerja seluruh ASN	Peralatan yang menujang capaian Kinerja seluruh ASN		<u>Capaian Kinerja x 100</u> Target Kinerja	80%	85%	90%	95%	100%	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Sekretaris	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Optimalnya Kinerja ASN	Persentase capaian kinerja seluruh ASN	Jasa Penunjang Capaian Kinerja seluruh ASN		<u>Capaian Kinerja x 100</u> Target Kinerja	80%	85%	90%	95%	100%	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Sekretaris	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Kinerja ASN	Persentase capaian kinerja seluruh ASN	Pemeliharaan BMD dapat menunjang capaian kinerja seluruh ASN		<u>Capaian Kinerja x 100</u> Target Kinerja	80%	85%	90%	95%	100%	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Sekretaris	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalnya Kinerja ASN	Persentase capaian kinerja seluruh ASN	Administrasi pegawai tertata dapat menunjang capaian kinerja seluruh ASN		<u>Capaian Kinerja x 100</u> Target Kinerja	80%	85%	90%	95%	100%	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Sekretaris	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terkendalinya Perencanaan dan pelaporan PAD pada OPD	Optimalnya target PAD	Perencanaan dan Laporan PAD terkendali		Percentase = <u>capaian PAD x100</u> Target	80%	80%	90%	95%	100%	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Sekretaris	
Perencanaan	Meningkatnya	Nilai AKIP	Perencanaan	Hasil Evaluasi Sakip dari Inspektorat		75	80	85	90	95	Dinas	Sekretaris	

	,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kualitas kinerja Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	OPD	penganggaran dan evaluasi tertata dan terencana		Nilai BB	Nilai A	Nilai A	Nilai AA	Nilai AA	Perdagangan Kab.B/S	
	Administrasi Keuangan	Optimalnya Kinerja ASN	Persentase capaian kinerja seluruh ASN	Pelaporan keuangan tertata	<u>Capaian Kinerja x 100</u> Target Kinerja	80%	85%	90%	95%	100%	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Sekretaris
	Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Tertibnya administrasi perencanaan dan pengelolaan barang milik daerah pada OPD	Pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	Pengelola BMD tertip dan tertata	Hasil Pemeriksaan dari Ispektorat dan BPK	Tidak ada temuan	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Sekretaris				

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2024

IKU Eslon IV

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Idikator Sub Kegiatan	Depenisi Oprasional	Formulasi	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Untuk menentukan kawasan industry	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	Bidang Perindustrian	Kasi Pengembangan Industri
2.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industry	Terselenggaranya koordinasi ,sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Untuk mempromosikan produk-prodak IKM (Pameran, dan Dekranasda)	26 Promosi/ Pameran selama 5 tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Perindustrian	Kasi Bimbingan Sarana Industri
3.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya koordinasi ,sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan plaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industry	Bantuan peralatan bagi IKM/Pelaku Usaha dalam mengembangkan usahanya	50 IKM selama 5 tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Perindustrian	Kasi Bimbingan Sarana Industri
4.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Terselenggaranya koordinasi ,sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri dan	Pelatihan untuk menumbuhkan IKM-IKM baru dan kesejateraan IKM/pelaku Usaha	Jumlah 150 Pelaku IKM selama 5 tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Perindustrian	Kasi Usaha Produksi

			peran serta masyarakat									
5.	Fasilitasi pengumpulan, pengelolaan dan analisis data industri data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SII Nas)	Terfasilitasinya pengumpulan, pengelolaan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SII Nas)	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengelolaan dan analisis data industri data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi	Pengumpulan data hasil Fasilitasi pengumpulan, pengelolaan dan analisis data industri data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi	Seluruh IKM yang terdata di Dinas PERDAGANGAN sebanyak 487 IKM	1 Dokumen	Bidang Perindustrian	Kasi Pengembangan Industri				
6.	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota melalui SII Nas	Terdiseminasi dan terpublikasinya data informasi dan analisis industri Kabupaten/Kota melalui SII Nas	Jumlah dokumen hasil Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SII Nas	Data-tada IKM yang dipublikasikan melalui aplikasi SII Nas, penyediaan data dan informasi agar dapat diakses secara cepat dan akurat oleh pemangku kepentingan	20 kali publikasi selama 5 tahun	1 Dokumen	Bidang Perindustrian	Kasi Pengembangan Industri				
7.	Pemantauan dan evaluasi melalui kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SII Nas	Terpantau dan dievaluasinya kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SII Nas	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/kota dalam Penyampaian Data ke SII Nas	Pengwasan dalam menentukan atas syarat perizinan denda atau sangsi oleh perusahaan	Seluruh IKM yang terdata di Dinas PERDAGANGAN sebanyak 487 IKM	1 Dokumen	Bidang Perindustrian	Kasi Pengembangan Industri				
8.	Fasilitasi pemenuhan	Terfasilitasinya verifikasi teknis	Jumlah Dokumen hasil	Pemenuhan izin usaha		1	1	1	1	1	Bidang	Kasi

	komitmen perolehan IUI, IKUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINAS yang terintegrasi	fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi melalui SIINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	melalui OSS	25 IKM selama 5 tahun	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Perindustrian	Bimbingan Sarana Industri
9.	Fasilitasi pemenuhan komitmen prolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Tersedianya rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitemen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku Usaha yang memiliki izin	Membantu Kegiatan Usaha UMKM sebanyak 100 UMKM selama 5 tahun	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	17 Dokumen	18 Dokumen	Bidang Perdagangan	Kasi Usaha Perdagangan
10.	Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang	Tersedianya dokumen tanda daftar gedung	Jumlah Dokumen Tanda Dftar Gedung	Jumlah Pengawasan yang memiliki Tanda Daftar Gudang	Memfasilitasi /Pengawasan tersedianya gudang yang berizin sebanyak 60 gudang selama 5 tahun	12 Dokumen	Bidang Perdagangan	Kasi Usaha Perdagangan				
11.	Faasilitasi perizinan surat	Meningkatnya Pelaku Usaha /	Jumlah Dokumen	Jumlah Rekomendasi	Memfasilitasi perizinan waralaba sebanyak 60 pelaku usaha/badan usaha	20	21	15	16	18	Bidang Perdagangan	Kasi Usaha

	tanda pendaftaran dan;/ atau lanjutan waralab (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik	Badan Usaha waralaba dalaterdaftar dan terintergrasi scara elektronik	Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	STPW Pelaku Usaha	selama 5 tahun	Dokuen	Dokuen	Dokuen	Dokuen	Dokuen	n	Perdagangan
12.	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Terlaksanya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Pemantauan penyimpanan bahan berbahaya	Pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya sebanyak 15 Pelaku Usaha selama 5 tahun	5 Laporan	6 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	Bidang Perdagangan	Kasi Usaha Perdagangan
13.	koordinasi dan singkronisasi layanan penerbitan SKA	Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah SKA yang di terbitkan	Koordinasi dan singkronisasi layanan penerbitan SKA selama 5 tahun	10 Dokumen	13 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	Bidang Perdagangan	Kasi Usaha Perdagangan
14.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang akan dibangun	Penyediaan sarana distribusi perdagangan sebanyak 15 Unit selama 5 tahun	3 Unit	Bidang Perdagangan	Kasi sarana distribusi perdagangan				
15.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Perdagangan (Pasar)	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan sebanya 15 Unit selama 5 tahun	3 Unit	Bidang Perdagangan	Kasi Usaha Perdagangan				
16.	pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitass Perdagangan yang di bina	Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan sebanyak 70 Pasar selama 5 tahun	3 Dokumen	Bidang Perdagangan	Kasi Usaha Perdagangan				

17.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Agen dan pasar Rakyat yang dipantau	Pengendalian ketersedian barang kebutuhan pokok dan barang penting sebanyak 60 laporan selama 5 tahun	12 Laporan	Bidang Perdagangan	Kasi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar				
18.	Pemantauan harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha ditribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Tersedianya Laporan Pemantauan harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha ditribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha ditribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Pemantauan harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha ditribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok pada pelaku usaha sebanyak 240 Laporan selama 5 tahun	48 Laporan	Bidang Perdagangan	Kasi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar				
19.	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus sebanyak 10 Laporan selama 5 tahun	2 Laporan	Bidang Perdagangan	Kasi Sarana dan Distribusi Perdagangan				
20.	Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	Terlengkapinya Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan dokumen Perizinan	Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan sebanyak 18 Dokumen selama 5 tahun	5 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Bidang Perdagangan	Kasi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar
21.	Pengawasan Penyaluran dan penggunaan pupuk dan	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan	Jumlah Lapran Pengawasan penyaluran pupuk	Pengawasan penyaluran pupuk dan pestesida bersubsidi sebanyak 60 Laporan selama 5 tahun	12 Laporan	Bidang Perdagangan	Kasi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan				

	pestisida bersubsidi	Penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	pupuk dan pestisida bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%								Barang Beredar
22.	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera dan Tera Ulang	Meningkatnya kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Diterima Ulang	Alat yang akan di tera tera ulang yang ada di pasar dan industry-industri kecil	Jumlah alat Unit yang melakukan tera dan tera ulang selama 5 tahun (890 Unit)	120 Unit	150 Unit	170 Unit	200 Unit	250 Unit	Laporan Tahunan Kmetrologian
23.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pemantauan oleh metrology legal bagi pelaku usaha yang menggunakan alat tera	162 Pelaku Usaha selama 5 tahun	20 Orang	30 Orang	35 Orang	37 Orang	40 Orang	Laporan Tahunan Kmetrologian
24	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat kabupaten /kota	Terlaksananya promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Pelaksanaan promosi P3DN di lingkungan pemerintah Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	Bidang Perdagangan
25	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Meningkatnya akses pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh umkm melalui kemitraan dengan Retail, Marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan Retail, Marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah produk UMKM yang promosikan	Jumlah UMKM yang menjalin kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	-	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	Bidang Perdagangan
26	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Tersediannya sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah data dan infomasi sistem dan jaringan	Jumlah Sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Sistem dan jaringan informasi perdagangan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Perdagangan

	perdagangan		informasi perdagangan							n	
27,	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan Sandang Produksi dalam negeri	Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi	Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan Sandang Produksi dalam negeri	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	Bidang Perdagangan Kasi Pengawas Perdagangan
28.	pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diawasi baik secara kelembagaan dan Usaha selama 5 tahun	Jumlah Koperasi yang sehat dan aktif (86 Koperasi	12 Unit usaha	15 Unit Usaha	17 Unit Usaha	20 Unit Usaha	22 Unit Usaha	Bidang koperasi dan UM Kasi Pembi naan Kelembagaan SDM Koperasi dan Usaha Mikro
29.	Pelaksanaan penilaian kesehatan ksp/usp koperasi kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Unit penilaian kesehatan yang telah dilaksanakan penilaian kesehatan	Jumlah UNIT usaha koperasi yang diawasi/dinilai kesehatannya selama 5 tahun	Jumlah koperasi yang sehat dan akuntabel secara kelembagaan dan usaha (86 Koperasi) selama 5 tahun	12 Koperasi	15 Unit Usaha	17 Unit Usaha	20 Unit Usaha	22 Unit Usaha	Bidang koperasi dan UM Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi
30.	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Jumlah Anggota/pengurus koperasi yang ditingkatkan kemampuan SDM perkoperasiannya selama 5 tahun	Jumlah (Pengurus,Pengawas,Manager, Kelompok masyarakat pra koperasi) yang mengikuti diklat perkoperasian yaitu: (6 orang x 86 koperasi x 5 tahun)=2580 orang selama 5 tahun	510 Orang	510 Orang	520 Orang	520 Orang	520 Orang	Bidang koperasi dan UM Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi
31.	Pemberdayaan peningkatan Produktivitas, Nilai tambah,	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan UKM serta Kapasitas	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang di tingkatkan	Jumlah koperasi yang diberdayakan(86 Orang) selama 5 tahun	12 Orang	15 Orang	17 Orang	20 Orang	22 Orang	Bidang koperasi dan UM Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan

	Akses Pasar,Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Strandarisasi dan restrukturisasi Usaha Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	dan kompetensi SDM UKM dan kewirausahaan	kewirausahaan	kemampuan SDMnya selama 5 tahun								Koperasi
32.	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan Restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan Restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi dan standarisasi produk agar dapat berkembang dan berdaya saing.	Jumlah Unit Usaha baru yang terbentuk secara lengkap (legalitas izin dan usaha) dan yang berkembang (870 Unit Usaha)	120 Unit Usaha	150 Unit Usaha	170 Unit Usaha	200 Unit Usaha	230 Unit Usaha	Bidang koperasi dan UM	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
33.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Usaha Mikro yang mejalin kemitraan dengan pihak ke 3 selama 5 athun	Jumlah Usaha Mikro yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga (870 Unit Usaha) selama 5 tahun	120 Unit Usaha	150 Unit Usaha	170 Unit Usaha	200 Unit Usaha	230 Unit Usaha	Bidang koperasi dan UM	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
34.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Usaha Mikro yang mejalin kemitraan dengan pihak ke 3 selama 5 athun	Jumlah Usaha Mikro yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga (870 Unit Usaha) selama 5 tahun	120 Unit Usaha	150 Unit Usaha	170 Unit Usaha	200 Unit Usaha	230 Unit Usaha	Bidang koperasi dan UM	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro

35.	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Usaha Mikro yang difasilitasi menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam 5 tahun	Jumlah UM yang terkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak pihak terkait dalam pemberdayaan usaha mikro (870 Unit Usaha)	120 Unit Usaha	150 Unit Usaha	170 Unit Usaha	200 Unit Usaha	230 Unit Usaha	Bidang koperasi dan UM	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
36.	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Usaha Mikro yang difasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dan standarisasi Produk	-	-	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	Bidang koperasi dan UM	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
37.	Penyediaan Komponen instalasi listrik, penerangan bengunan kantor	Tersediaya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Alat-alat listrik yang disediakan	Jumlah Komponen Intalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor yang tersedia 1 paket x 5 tahun = 5 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepgawaiian
38.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perlengkapan kantor yang perlu disediakan (Laptop, Printer dll)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan/dibeli 1 Paket x 5 tahun = 1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepgawaiian
39.	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Alat-alat tulis yang tersedia	Jumlah komponen bahan logistik kantor yang dibeli/diadakan 1 paket x 5 tahun	1 paket	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepgawaiian				
40.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang tersedia	Bahan cetak dan pengadaan yang tersedia	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 paket x 5 tahun = 60 komponen	1 paket	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepgawaiian				
41.	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Bahan bacaan dan peraturan perundangan-	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Dokumen x 5 tahun	12 Dokumen	Dinas Perdagangan	Kasubag Umum dan Kepgawaiian				

	Perundang-Undangan	Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	undangan tersedia						Kab.B/S	
42.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasnya kebutuhan kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu 2 Laporan x 5 tahun	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepgawaiian
43.	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam dan perjalanan dinas luar daerah (1 Laporan x 5 tahun)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepgawaiian
44.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya kendaraan dinas /operasional yang diadakan (1 Unit yaitu kendaraan roda dua dan roda empat x 5 tahun)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepgawaiian
45.	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersediannya perlengkapan mebel	Jumlah meubeler yang diadakan (2 Unit x 5 tahun)	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepgawaiian
46.	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersediannya peralatan mesin dan lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan selama 5 tahun (2 Unit x 5 Tahun)	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepgawaiian
47.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pembayaran telpon, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik x 5 tahun 12 Laporan x 5 tahun = 60 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepgawaiian
48.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Intalasi (perbaikan) peralatan dan perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor 1 Laporan X 5 Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Perdagangan	Kasubag Umum dan Kepgawaiian

	kantor	kantor	Kantor yang Disediakan	kantor					Kab.B/S		
49.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Honorarium Pengelola kuangan dan honorarium PHL	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar 1 Laporan x 5 tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepegawaian
50.	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan pembayaran pajak kendaraan	Jumlah perbaikan kendaraan dinas x 5 tahun 8 Unit x 5 tahun = 40 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepegawaian
51.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung/rehab (1 Unit pertahun x 5 tahun)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepegawaian
52.	Peningkatan Sarana dan Perasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Atribut atau perlengkapan sarana dan prasarana pegawai	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan per tahun (1 unit per tahun)	1 unit	-	1 unit	-	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepegawaian
53.	Pendataan dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KP4, Kepangkatan, laporan Pajak, Laporan harta kekayaan LHASN, LHKPN Dll	Jumlah data pegawai setiap tahun (1 dokumen x 5 tahun)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepegawaian
54.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan	Aplikasi kepegawaian	Jumlah informasi kepegawaian (1 Dokumen x 5 tahun)	1 kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Perdagangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

			Sistem Informasi Kepergawaiian							Kab.B/S	
55.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pemberian riwoat atau panesmat ASN dalam setiap bulan	Dokumen penilaian kinerja (1 dokumen x 5 tahun)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepergawaiian
56.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bimtek dan pelatihan kepemimpinan	PNS yang mengikuti diklat formal x 5 tahun (2 orang x 5 tahun = 10 orang)	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepergawaiian
57.	Bimbingan Teknis Implemintasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek dalam Teknis dalam pengembangan karer	Jumlah yang mengikuti bimtek selama 5 tahun (2 orang x 5 tahun= 10 orang)	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Umum dan Kepergawaiian
58.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Bimtek pengelolaan keuangan PAD	Jumlah Dokumen x 5 tahun (1 dokumen x 5 tahun)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
59.	Pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan PAD	Jumlah Dokumen x 5 tahun (1 dokumen x 5 tahun= 5 dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
60.	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Tersesunanya Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan (RENSTRA, RENJA, IKU, PK, RKA, DPA, LKJ, LPPD dll)	Jumlah Dokumen x 5 tahun (15 dokumen x 5 tahun= 75 dokumen)	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
61.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan keuangan (LK)	Jumlah Laporan dokumen 5 tahun (5 x 5	5 Laporan	-	-	-	Dinas Perdagangan	Kasubag Perencanaan

	Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan = 25 laporan)						an Kab.B/S	dan Keuangan
62.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	Jumlah Dokumen x 5 tahun (1Laporan x 5 tahun= 5 laporan)	1 Laporan	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
63.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN x 5 Tahun (150 orang)	12 Orang/ Bulan	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
64.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Adminnistrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penerimaan, penempatan, Pengembangan dan Pemberhentian tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya	Jumlah ASN/non ASN yang menerima honor per 5 tahun (94 ASN)	12 Dokumen	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
65.	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir Tahun	Jumlah Dokumen akhirtahun x 5 tahun (1dokumen x 5 tahun= 5 laporan)	1 Laporan	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				

			Tahun SKPD									
66.	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, semesteran	Jumlah Dokumen bulanan triwulan semesteran x 5 tahun (18 Laporan x 5 tahun= 90 laporan)	18 laporan	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
67.	Penyusnanaan Perencanaan kebutuhan barang Milik daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen prencanaan BMD 5 tahun (2 Dokumen x 5 tahun= 10 dokumen)	2 dokumen	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
68.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen Penataan BMD x 5 tahun (18 Laporan x 5 tahun = 90 dokumen)	18 Laporan	Dinas Perdagangan Kab.B/S	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				